

**PENGUMUMAN**  
**RENCANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PENGADUAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM LKPP**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 20319/D.4.3/08/2022

Dalam rangka peningkatan upaya pengawasan dan pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta adanya pembaharuan peraturan terkait dengan Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), LKPP pada tahun anggaran 2022 ini berencana menyelenggarakan **Kegiatan Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

| No | Waktu Pelaksanaan         | Media  |
|----|---------------------------|--|
| 1  | Selasa, 06 September 2022 | <i>Video Conference melalui Zoom Meeting</i> |
| 2  | Selasa, 13 September 2022 |  |
| 3  | Selasa, 20 September 2022 |  |
| 4  | Selasa, 27 September 2022 |  |

**Ketentuan peserta :**

1. Kegiatan akan dilaksanakan pada pukul 13.00 – 16.30 WIB.
2. Pejabat/Pegawai Inspektorat/Inspektorat Jenderal/Inspektur Utama di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
3. Peserta memilih waktu pelaksanaan serta mendaftar dengan mengisi formulir secara *online* melalui link <https://bit.ly/DaftarSosisPerlemSistemPengaduan2022>;
4. Penentuan peserta mutlak ditentukan oleh LKPP dan tautan *Zoom Meeting* akan dikirimkan melalui email atau nomor *Whatsapp* yang disampaikan saat pendaftaran;
5. Peserta tidak dipungut biaya;
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor *Whatsapp*: Sdri. Tia Tri (0895337799524) atau Sdri. Elsy Amelia (082327106444).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

TTD

Jhon Piter Halomoan Situmorang